

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

1. Pasca Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, kewenangan pengawasan eksternal yang dimiliki KY terhadap hakim konstitusi dihapus dengan alasan telah mengganggu independensi hakim konstitusi. Hal tersebut mengakibatkan hakim konstitusi hanya memiliki pengawas internal yang dijalankan oleh Majelis Kehormatan MK dan Dewan Etik Hakim Konstitusi. Namun, hakikat pengawasan tidak tercapai dan pengawasan hakim konstitusi menjadi lemah karena tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi.
  
2. Independensi hakim konstitusi yang mana merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum bukanlah merupakan independensi mutlak. Namun independensi tersebut hanya sebatas fungsi yudisial yang dilaksanakan oleh hakim konstitusi. Maka pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap moral dan etik hakim konstitusi tidak mengganggu independensi hakim konstitusi melainkan menjamin hakim konstitusi tidak melanggar KEPPH, tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat dan terhindar dari terjadinya *conflict of interest*.

#### **2. SARAN-SARAN**

1. MPR harus melakukan amandemen UUD 1945 yang ke-5 (lima) terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan atau penjelasan secara jelas bahwa hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) adalah mencakup

keseluruhan hakim di seluruh lingkup peradilan yang di dalamnya termasuk hakim konstitusi.

2. Pemerintah dan DPR sebagai legislator untuk melakukan revisi UUKY dengan memperbaiki standar kualifikasi untuk menjadi anggota KY sehingga dapat memiliki posisi setara dengan seluruh lembaga negara.
3. KY dalam mengawasi hakim jangan sampai mencampuri fungsi yudisial hakim konstitusi karena batasan independensi hakim tidak boleh dilanggar. KY hanya berwenang melakukan pengawasan dalam ranah perilaku hakim.
4. Hakim konstitusi seharusnya tidak melanggar asas *iudex nemo* dengan memutus perkara yang berhubungan dengan dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aloysius Wisnubroto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997
- A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman RI*, Pusat Penerbitan Universitas, LPPM, Universitas Islam Bandung, Bandung, 1995
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab*, LeIP, Jakarta, 2002
- Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama Edisi Revisi, Jakarta, 2000
- Busthanul Arifin, *Masa Lampau yang Belum Selesai (Percikan Pikiran Tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum)*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2007
- Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Isharyanto, *Hukum Tentang Kelembagaan Negara*, PT Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2016
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2003

- Jimly Asshidiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Johansyah, *Independensi Hakim di Tengah Benturan Politik dan Kekuasaan dalam Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010
- Kulijer, The Blindfold of lady 115 ce, *Judicial Independence and Impartiality in Light of the Requirements of Article 6 EHCR*, Meijers Instituut, Leiden, 2004
- Le Roy, Crince. *Kekuasaan ke-empat Pengenal Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, 1981
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Mohammad Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Mohammad Mahfud M.D., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Montesquieu, *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoirul Anam Nusa Media, Bandung, 2007
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Jakarta, PT. Ramdina Prakasa, 2005
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. Revisi-Cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Oliver Wendell, *The Path of The Law*, Applewood Books, Belford, 2009

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Saldi Isra, *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Penerbit Kompas Media, Jakarta, 2010

Soejamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1986

Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembagunan*, PT Gunung Agung, Jakarta, 1982

### **SKRIPSI**

Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004

Andi Setiawan, *Pengantar State Auxiliary Agency*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2015

### **JURNAL HUKUM, MAJALAH HUKUM**

Ahmad Ashar, *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengangkatan Hakim Agung Berdasarkan UU Komisi Yudisial*, Jurnal DAHA Vol. 1 No. 42 Januari 2009

Alkostar, Artidjo. *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa*, dalam Majalah Hukum (Jakarta: Varia Peradilan, 2005), No. 238

Bagir Manan, *Restrukturisasi Badan Peradilan*, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX. No. 239, Jakarta, 2005

Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2003

*ICJR dan Pegiat LSM Amerika Kunjungi MK* dalam Majalah Konsitusi No.121 Maret 2017: *Kebutuhan Pokok Bebas Pajak*

Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi

- Jurnal Konstitusi, *Kompetensi Hakim Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi*, Jakarta, 2011
- Ketua Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim*, Varia Peradilan No. 252 Oktober 2006
- Komisi Yudisial, *Bunga Rampa Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, 2009
- Malik, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 Desember 2007, Universitas Bung Hatta
- Muchlis, *Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Ppengawasan Hakim*, Jurnal Suloh, Vol. VI No. 2 Agustus 2008
- Soemantri, Sri. *Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, dikutip dalam Bunga Rampai Refeksi Sam Tahun Komisi Yudisial RI, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Suparman Marzuki,. *Kewenangan Komisi Yudisial dalam konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial Edisi tahun 2013
- Tohari, Ahsin. *Desains Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.VII No. 1 Maret